

ABSTRAK

Dalam suatu Lembaga Pemerintah untuk menjalankan pekerjaannya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, membutuhkan faktor-faktor yang akan membantu pencapaian tujuan tersebut. Faktor yang dirasakan paling penting dan utama dalam menunjang pencapaian tujuan suatu Lembaga Pemerintah adalah faktor sumber daya manusia.

Oleh karena itu, Lembaga Pemerintah harus menyadari bahwa sumber daya manusia yang ada memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu yang ingin dipenuhi dengan bekerja pada suatu Lembaga Pemerintah. Apabila mereka merasa kebutuhan tersebut telah dipenuhi oleh tempat mereka bekerja, maka mereka merasa puas dengan balas jasa yang diberikan Lembaga Pemerintah dalam bentuk gaji. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian pemberian gaji pegawai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mengumpulkan data dan informasi yang relevan yang ada di Lembaga Pemerintah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan gaji pegawai, prosedur pembayaran gaji pegawai serta mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pembayaran gaji pegawai pada Dinas Kebakaran Kota Bandung.

Pada Dinas Kebakaran Kota Bandung kebijakan di lingkup PNS Dinas Kebakaran Kota Bandung tidak menggunakan sistem kebijakan pemotongan gaji pegawai dikarenakan pelanggaran disiplin, penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan gaji, penundaan pangkat, penurunan pangkat, pemecatan dan pemotongan penghasilan juga dapat dilakukan dari TPPNS (Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil) yang alokasinya dari APBD. Pada dasarnya kebijakan gaji yang diterapkan Dinas Kebakaran Kota Bandung yang diberikan pada pegawai didasarkan pada dua hal, yaitu Direct Compensation yang terdiri dari jumlah gaji bersih dan uang TPPNS serta Indirect Compensation yang terdiri dari tunjangan asuransi kesehatan dan cuti.

Proses pembayaran gaji melalui gaji bulanan, besarnya gaji yang akan diterima oleh pegawai terdiri dari : jumlah gaji bersih, gaji lembur dengan gaji tambahan lainnya seperti uang TPPNS dan tunjangan jabatan. Apabila pegawai tersebut memiliki pinjaman koperasi maka pinjaman tersebut akan dibayar dengan cara pemotongan gaji pegawai setiap bulannya. Prosedur pembayaran yang dilakukan menggunakan secara tunai untuk seluruh pegawai staff maupun lapangan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Kebakaran Kota Bandung dalam proses pembayaran gaji pegawai dapat memperlambat proses pembayaran gaji pegawai secara tunai. Hambatan secara tunai yaitu apabila waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka pembayaran gaji harus dilakukan pada hari sesudahnya yang dapat mempengaruhi proses pembayaran gaji bagi Dinas Kebakaran Kota Bandung maupun pegawai. Maka bagi Dinas Kebakaran Kota Bandung apabila pembayaran gaji pegawai tidak mesti tanggal 1 terutama apabila tanggal tersebut jatuh pada tanggal merah (libur) dan tidak dapat mengundurkan proses pembayaran gaji pegawai. Dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam proses pembayaran gaji pegawai penulis akan memberikan solusi yaitu : untuk pembayaran secara tunai, Dinas Kebakaran Kota Bandung harus menghitung secara jelas dan terinci jumlah penggajiannya agar tidak ada kesalahan dalam pemberian gaji pegawai.